

KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DITINJAU DARI SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Shinta Permata Sari^{†1} dan Banu Witono²

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jalan A. Yani, Tromol Pos 1, Surakarta-57102, Telp. (0271) 717417
Shinta.Sari@ums.ac.id¹
banu_witono@ums.ac.id²

Abstract

In order to create governmental accountability, the local government has to present the financial statement that reliable and timeliness, as being ruled in PP No. 71/2010. To achieve reliability and timeliness characteristics on local government financial reporting, its need highly quality human resources, appropriate internal control and information technology utilization. This research purposes to test the effect of human resources, internal control and information technology utilization to local government financial reporting reliability and timeliness. A survey was conducted to local government (Kabupaten or Kota) in Eks Karesidenan Surakarta Region through Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Collected data analyzed with multiple regression analysis. The results of this research show that human resources, internal control and information technology utilization tend to have effect on local government financial reporting reliability and timeliness.

Keywords: *human resources, internal control, information technology utilization, local government financial reporting, reliability, timeliness.*

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas organisasi pemerintah, pemerintahan daerah diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, seperti yang telah digariskan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Pelaporan keuangan daerah yang memenuhi karakteristik keterandalan dan ketepatanwaktuan membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, pengendalian internal yang tepat dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Data terkumpul dianalisis dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan maupun ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

Kata kunci: *sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, pelaporan keuangan daerah, keterandalan, ketepatanwaktuan.*

1. Latar Belakang Masalah

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan

pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Telah

diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai (Mustafa *et al* 2010).

Kebermanfaatan informasi merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas informasi (Winidyaningrum *et al* 2010).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP, Lampiran I: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (*timeliness*). Laporan keuangan memenuhi karakteristik andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatanwaktuan penyajiannya agar berguna dalam pengambilan keputusan.

Demi terselenggaranya keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Kualitas Informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional (Hullah *et al* 2012).

Teknologi informasi selain teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Indriasari *et al* 2008). Keseluruhan aktivitas organisasi pemerintah akan terlaksana, apabila dilakukan secara integral dengan pengendalian sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan organisasi tercapai.

Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, ditambah pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu dan memperlancar proses keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan

daerah, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Selain itu diperlukan pengendalian internal yang efektif dan efisien. Apabila informasi keuangan tersebut tidak disajikan secara andal dan tepat waktu, akan menyebabkan informasi kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan (Amey *et al* 2005 dalam Rosalin *et al* 2011).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan

Hipotesis

2.1. Pelaporan Keuangan Daerah

Suwardjono (2012:101) menyatakan bahwa pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomi dan sosial negara. Dalam PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Bagian KKAP paragraf 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah sebagai entitas pelayanan publik, juga perlu mempertanggungjawabkan anggaran dan kinerjanya. Bentuk utama dari pertanggungjawaban tersebut adalah penyajian laporan keuangan daerah. Selanjutnya pada KKAP paragraf 60 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), Laporan Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk memenuhi tujuan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dengan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi pemerintah. Karakteristik normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dijelaskan dalam SAP Bagian KKAP Lampiran I (35-40), antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (*timeliness*). Laporan keuangan memenuhi karakteristik

KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatanwaktuan penyajiannya. Hal ini dilakukan agar akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan daerah dapat tercapai (KKAP paragraf 22).

2.2. Sumber Daya Manusia

Terjadinya perubahan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah bukan hanya berdampak terhadap basis akuntansi yang digunakan maupun struktur APBD, akan tetapi juga berdampak terhadap teknis operasional penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi, laporan serta pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai.

Sumber daya manusia merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (GTZ dan USAID/CLEAN Urban, 2001 dalam Indriasari *et al* 2008). Hullah *et al* (2012) menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional. Keterandalan pelaporan keuangan daerah dapat tercapai apabila sumber daya manusianya berkualitas dan kualitas tersebut diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*) (Susilo, 2002 dalam Aritonang *et al* 2009), terutama untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan daerah pernah dilakukan Winidyaningrum *et al* (2010), Adriani (2010) dan Hullah *et al* (2012). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu diajukan hipotesis:

H_{1a}: Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

Winidyaningrum *et al* (2010) menyatakan bahwa sumber daya manusia akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan daerah sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah, yaitu penelitian Indriasari *et al* (2008), dan Mustafa *et al* (2010). Ketepatanwaktuan

pelaporan keuangan daerah ini akan semakin meningkatkan relevansinya dalam pengambilan keputusan. Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, maka diajukan hipotesis:

H_{2a}: Sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah

2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali *et al* 2002). Mustafa *et al* (2010) secara umum menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat ditinjau dari: (a) pemanfaatan perangkat (kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi meliputi perangkat lunak, keras dan sistem jaringan); (b) pemrosesan dan penyimpanan (pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan serta sistematis dan menyeluruh); dan (c) perawatan (adanya jadwal pemeliharaan peralatan perangkat teknologi informasi secara teratur guna mendukung kelancaran pekerjaan).

Perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya, (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini (dalam Winidyaningrum *et al* 2010). Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang andal.

Penelitian Indriasari *et al* (2008), Winidyaningrum *et al* (2010), Mustafa *et al* (2010), Rosalin *et al* (2011) dan Hullah *et al* (2012) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Oleh sebab itu diajukan hipotesis penelitian:

H_{1b}: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan (Winidyaningrum *et al* 2010). Penelitian Indriasari *et al* (2008), Winidyaningrum *et al* (2010), Mustafa *et al* (2010) dan Rosalin *et al* (2011) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis:

H_{2b}: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

2.4. Pengendalian Internal

Berdasarkan PP No. 60/2008 Pasal 1 (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Noviyanti (2004 dalam Winidyaningrum *et al* 2010), pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan atau ketidak-akuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Selain itu menurut Indriasari *et al* (2008), pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Sistem pengendalian internal menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keterandalan karena Laporan Keuangan yang dihasilkan benar dan valid. Penelitian Indriasari *et al* (2008) dan Rosalin *et al* (2011) menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, diajukan hipotesis:

H_{1c}: Pengendalian internal berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatan waktu. Ketidak-tepatan penyajian laporan keuangan juga berkaitan dengan kurang ditaatinya pengendalian internal yang diterapkan. Penelitian Mirnayanti (2013) menunjukkan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal inilah yang mendasari diajukannya hipotesis:

H_{2c}: Pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan survei kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta, yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintahan Kota Surakarta. DPPKAD dipilih karena sesuai PP No. 41/2007, DPPKAD

merupakan dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berkaitan dengan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset pemerintah kabupaten/kota, termasuk pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai DPPKAD di wilayah Eks Karesidenan Surakarta terutama pegawai bidang akuntansi, anggaran dan aset sejumlah 290 karyawan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *convenience sampling*.

3.1. Definisi Operasional Variabel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden atas pernyataan yang disajikan dalam kuesioner. Definisi operasional untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah:

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keterandalan pelaporan keuangan daerah (ANDL) dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah (TPT). Keterandalan pelaporan keuangan menurut PP No. 71/2010 (Lampiran I: par. 38) merupakan kemampuan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Selain itu dijelaskan juga pada paragraf 34, bahwa pelaporan keuangan dikatakan relevan jika memenuhi unsur ketepatan waktu. Pelaporan keuangan yang disajikan tepat waktu dapat menghasilkan informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Instrumen keterandalan (tujuh item) dan ketepatan waktu (tiga item) pelaporan keuangan daerah diukur dengan instrumen yang disesuaikan dengan PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dikembangkan dalam penelitian Indriasari *et al* (2008).

3.1.2. Variabel Independen

3.1.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (GTZ dan USAID/CLEAN Urban, 2001 dalam Indriasari *et al* 2008). Variabel sumber daya manusia diukur dengan instrumen yang dikembangkan Indriasari *et al* (2008) berdasarkan penelitian GTZ dan USAID/CLEAN Urban (2001), dengan 10 item pernyataan.

3.1.2.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali *et al* 2002). Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Indriasari *et al* (2008) berdasarkan penelitian Jurnali *et al* (2002), dengan 8 item pernyataan.

3.1.2.3. Pengendalian Internal (PI)

PP No. 60/2008 Pasal (1) tentang SPIP menjelaskan bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan PP No. 60/2008 tentang SPIP. Seluruh pernyataan diukur dengan skala likert lima poin, mulai (1) Sangat Tidak Setuju sampai (5) Sangat Setuju.

3.2. Pengujian Instrumen

Instrumen akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi *pearson's product moment* (r_{xy}) (Santoso 2000:243) untuk setiap skor item dengan skor totalnya. Suatu item dinyatakan valid jika nilai signifikansi $r_{xy} < 0,05$. Uji reliabilitas dilakukan dengan *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* $> 0,70$ (Ghozali 2011:49).

3.3. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan guna memenuhi asumsi regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali 2011:58). Masalah multikolinearitas diuji dengan melihat *tolerance value* (kurang dari 0,1) atau nilai *variance inflation factor* (VIF, lebih dari 10) (Ghozali 2011:106). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*, dengan meregresikan nilai absolut residual dari variabel independen (Ghozali, 2011:142).

3.4. Pengujian Hipotesis

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$ANDL = a + b_1SDM + b_2PTI + b_3PI + e \quad (1)$$

$$TPT = a + b_1SDM + b_2PTI + b_3PI + e \quad (2)$$

Keterangan:

a : Konstanta

b_1-b_3 : Koefisien regresi

ANDL: Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah

TPT : Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Daerah

SDM : Sumber Daya Manusia

PTI : Pemanfaatan Teknologi Informasi

PI : Pengendalian Internal

e : eror

Persamaan 1 digunakan untuk menguji hipotesis 1a, 1b dan 1c, sedangkan persamaan 2 digunakan untuk menguji hipotesis 2a, 2b dan 2c.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Uji Kualitas Data

Jumlah kuesioner yang didistribusikan seluruhnya 290 kuesioner, yang diterima kembali

adalah 198 kuesioner (68,28%) dan 166 kuesioner yang dapat diolah (57,24%).

4.1.1. Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas untuk setiap item pernyataan dari kelima instrumen untuk variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Dari hasil uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan untuk lima instrumen variabel adalah valid. Rentang nilai korelasi item yang valid adalah antara 0,482 – 0,765 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05.

Tabel 1. Hasil uji validitas

Variabel	Jumlah Item	Rentang r_{xy}	Keterangan
SDM	10	0,482 – 0,627	Seluruh Item Valid
PTI	8	0,602 – 0,728	Seluruh Item Valid
PI	9	0,504 – 0,680	Seluruh Item Valid
ANDL	7	0,580 – 0,765	Seluruh Item Valid
TPT	3	0,582 – 0,751	Seluruh Item Valid

Sumber: data primer diolah

4.1.2. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas untuk seluruh instrumen dari lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 2 dan menunjukkan bahwa kelima instrumen tersebut reliabel dengan nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$.

Tabel 2. Hasil uji reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
SDM	0,738	Reliabel
PTI	0,826	Reliabel
PI	0,847	Reliabel
ANDL	0,789	Reliabel
TPT	0,770	Reliabel

Sumber: data primer diolah

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 3 menunjukkan nilai probabilitas (*p-value*) dari kedua persamaan dalam penelitian ini, ternyata lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil uji normalitas

Keterangan	<i>Kolmogorov-Sminov Z</i>	<i>p-value</i>	Keterangan
Persamaan 1	0,804	0,538	Data terdistribusi normal
Persamaan 2	0,934	0,348	Data terdistribusi normal

Sumber: data primer diolah

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam kedua persamaan regresi dari penelitian ini.

Tabel 4. Hasil uji multikolinieritas

Persamaan 1			
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
SDM	0,527	1,899	Tidak terjadi multikolinieritas
PTI	0,475	2,105	Tidak terjadi multikolinieritas
PI	0,401	2,494	Tidak terjadi multikolinieritas
Persamaan 2			
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
SDM	0,527	1,899	Tidak Terjadi Multikolinieritas
PTI	0,475	2,105	Tidak Terjadi Multikolinieritas
PI	0,401	2,494	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: data primer diolah

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji *glesjer* pada Tabel 5 menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada kedua persamaan regresi, karena taraf signifikansi nilai t_{hitung} lebih besar dari 5% ($p > 0,05$).

Tabel 5. Hasil uji heteroskedastisitas

Persamaan 1			
Variabel	t_{hitung}	Signifikansi	Keterangan
SDM	0,398	0,691	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
PTI	-0,090	0,928	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
PI	-0,108	0,914	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Persamaan 2			
Variabel	t_{hitung}	Signifikansi	Keterangan
SDM	-0,283	0,778	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
PTI	-0,526	0,599	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
PI	-0,112	0,911	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: data primer diolah

4.3. Hasil Uji Hipotesis

4.3.1. Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah

Tinjauan tentang keterandalan pelaporan keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan persamaan 1. Hasil uji hipotesis dengan analisis regresi berganda secara lengkap disampaikan pada Tabel 6. Persamaan 1 dalam penelitian ini merupakan model yang fit, karena nilai signifikansi dari uji F yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan nilai koefisien determinasi ($Adjusted R^2$) 0,566.

Tabel 6. Hasil uji hipotesis keterandalan pelaporan keuangan daerah

Variabel	t_{hitung}	Signifikansi	Keterangan
Sumber Daya Manusia	2,743	0,007	H_0 Ditolak
Pemanfaatan Teknologi Informasi	4,913	0,000	H_0 Ditolak
Pengendalian Internal	3,668	0,000	H_0 Ditolak
F statistic	72,707	0,000	
$Adjusted R^2$	0,566		

Sumber: data primer diolah

Hasil uji hipotesis 1a (H_{1a}) menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia memiliki $t_{hitung} = 2,743$ dengan signifikansi = 0,007 ($< 0,05$), maka H_0 ditolak dan hipotesis 1a (H_{1a}) terdukung secara statistik. Artinya sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia ternyata menentukan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Dinamika perubahan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pelaporan keuangan daerah ternyata mampu diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Kemampuan ini terjadi karena sumber daya manusia, terutama pada DPPKAD, telah siap untuk mendukung pengelolaan pelaporan keuangan daerah secara andal. Kondisi tersebut bukan hanya berdampak terhadap basis akuntansi yang digunakan maupun struktur APBD, akan tetapi juga berdampak terhadap teknis operasional penatausahaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Indriasari *et al* (2008) dan Mustafa *et al* (2010).

Hasil uji hipotesis 1b (H_{1b}) menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki $t_{hitung} = 4,913$ dengan signifikansi = 0,000 ($< 0,05$), maka H_0 ditolak dan hipotesis 1b (H_{1b}) terdukung secara statistik. Artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ternyata menentukan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta ternyata telah mampu memanfaatkan teknologi informasi dan tugas-tugas akuntansi secara baik. Agar laporan keuangan daerah tetap andal, perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Indriasari *et al* (2008), Winidyaningrum *et al* (2010), Mustafa *et al* (2010), Rosalin *et al* (2011) dan Hullah *et al* (2012).

Hasil uji hipotesis 1c (H_{1c}) menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal memiliki $t_{hitung} = 3,368$ dengan signifikansi = 0,000 ($< 0,05$), maka H_0 ditolak dan hipotesis 1c (H_{1c}) terdukung secara statistik. Artinya pengendalian internal berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian internal ternyata menentukan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta mampu menjalankan kegiatan pengendalian sesuai yang digariskan oleh peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan pengendalian internal pada setiap DPPKAD mampu dilaksanakan secara efektif. PP No. 60/2008 tentang SPIP telah menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral, yang salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas **keandalan** pelaporan keuangan. Hasil

KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriasari *et al* (2008) dan Rosalin *et al* (2011).

4.3.2. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah

Tinjauan tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2. Hasil uji hipotesis dengan analisis regresi berganda secara lengkap disampaikan pada Tabel 7. Persamaan 2 dalam penelitian ini merupakan model yang fit, karena nilai signifikansi dari uji F menunjukkan nilai 0,000 dan lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dari persamaan 2 adalah sebesar 0,503.

Tabel 7. Hasil uji hipotesis ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah

Variabel	t_{hitung}	Signifikansi	Keterangan
Sumber Daya Manusia	1,995	0,048	H ₀ Ditolak
Pemanfaatan Teknologi Informasi	3,290	0,001	H ₀ Ditolak
Pengendalian Internal	4,487	0,000	H ₀ Ditolak
F statistik	56,645	0,000	
<i>Adjusted R²</i>	0,503		

Sumber: data primer diolah

Hasil uji hipotesis 2a (H_{2a}) menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia memiliki $t_{hitung} = 1,995$ dengan signifikansi = 0,048 (< 0,05), maka H₀ ditolak dan hipotesis 2a (H_{2a}) terdukung secara statistik. Artinya sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia ternyata menentukan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Berubahnya peraturan tentang pengelolaan pelaporan keuangan daerah ternyata mampu diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta dengan tetap melakukan pelaporan keuangan secara tepat waktu dengan dukungan sumber daya manusia-nya. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Winidyaningrum *et al* (2010), Adriani (2010) dan Hullah *et al* (2012).

Hasil uji hipotesis 2b (H_{2b}) menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki $t_{hitung} = 3,290$ dengan signifikansi = 0,001 (< 0,05), maka H₀ ditolak dan hipotesis 2b (H_{2b}) terdukung secara statistik. Artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ternyata menentukan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta ternyata mampu mengintegrasikan teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi-nya, agar laporan keuangan daerah tidak sampai kehilangan nilai ketepatan waktu. Pemerintah daerah melalui DPPKAD mampu memanfaatkan perangkat komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan data keuangan, sekaligus menggunakan teknologi komunikasi untuk penyebarannya (salah satunya melalui internet). Disamping itu, juga dilakukan perawatan secara teratur

untuk perangkat teknologi informasi yang dimiliki. Hasil penelitian ini konsisten dengan Indriasari *et al* (2008), Winidyaningrum *et al* (2010), Mustafa *et al* (2010) dan Rosalin *et al* (2011).

Hasil uji hipotesis 2c (H_{2c}) menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal memiliki $t_{hitung} = 4,487$ dengan signifikansi = 0,000 (< 0,05), maka H₀ ditolak dan hipotesis 2c (H_{2c}) terdukung secara statistik. Artinya pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian internal ternyata menentukan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta ternyata mampu menjalankan kegiatan pengendalian sesuai SPIP yang ditetapkan melalui PP Nomor 60/2008, agar ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah dapat tercapai secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui DPPKAD telah mampu mengintegrasikan semua komponen organisasi secara terus menerus agar nilai ketepatan waktu informasi yang disyaratkan dapat tercapai. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Mirnayanti (2013).

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan dukungan pada keseluruhan hipotesis yang diajukan, artinya sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan maupun ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Pemerintah Daerah saat ini harus menghadapi peraturan lanjutan dari PP No. 71/2010, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah. Hal ini semakin memicu pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan semua kemampuannya guna menghadapi perubahan yang dinamis, agar pelaporan keuangan daerah juga semakin berkualitas dan memenuhi karakteristik kualitatifnya. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman akuntansi yang cukup untuk menghadapi penerapan basis akuntansi yang berubah dari basis kas modifikasian ke basis akrual.

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain: pertama, penelitian ini baru dilakukan pada tiga bidang dalam DPPKAD Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Kedua, penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner, sehingga kemungkinan karakteristik dan pendapat responden tidak tertangkap secara nyata. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah penelitian yang lebih luas dan dikembangkan dengan menggunakan metode eksperimen atau metode kualitatif. Penelitian selanjutnya juga harus mempertimbangkan perubahan

peraturan-peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah dan mempertimbangkan tinjauan tentang pentingnya pemahaman akuntansi bagi aparatur pemerintah daerah yang melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Adriani, W. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol 5, No.1: pp. 69-80.
- Aritonang, A. S. & Syarif, F. 2009. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12. Diunduh dari (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9738/1/10E00271.pdf>).
- Ghozali, I. 2011. *Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Hullah, A. R., Pangemanan, S., Tangkuman, S. & Budiarmo, N. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 3 – No 2: pp. 9-21.
- Indriasari, D. & Nahartyo, E. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir). *Kumpulan Simposium Nasional Akuntansi XI* di Pontianak, 23-24 Juli.
- Jurnali, T. & Supomo, B. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Volume 5, No.2: pp. 214-228.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mirnayanti. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sulawesi Barat)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin. Diunduh dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/5648>. Diunduh tanggal 1 Oktober 2013.
- Mustafa, S., Sutrisno & Rosidi. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi*. Diunduh dari <http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/32830/2.pdf>. Diunduh tanggal 30 September 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang **Organisasi Perangkat Daerah**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang **Sistem Pengendalian Intern**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan**.
- Rosalin, F. & Kawedar, W. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*. Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro. Diunduh dari <http://eprints.undip.ac.id/29439/1/jurnal.pdf>. Diunduh tanggal 7 Oktober 2013.
- Santoso, S. 2000. *SPSS. Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Suwardjono. 2012. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF
- Winidyaningrum & Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII* di Purwokerto.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis Pertama adalah dosen di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fokus pengajaran dan penelitiannya adalah pada akuntansi keperilakuan, sistem informasi dan akuntansi sektor publik. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi melalui Shinta.Sari@ums.ac.id.

Penulis Kedua adalah dosen di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fokus pengajaran dan penelitiannya adalah pada akuntansi sektor publik dan berpengalaman melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi melalui banu_witono@ums.ac.id.